

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012).
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- \_\_\_\_\_, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012).
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008).
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).
- Elza Syarif, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012).
- Gunanegara, *Hukum Pidana Agraria Logika Hukum Pemberian Hak atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2017).
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum Agraria & Real Estate Law*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2018).
- I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018).
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1991).
- Soeharyono Hadiwiyono, *Hukum Pertanahan Indonesia (Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia)*, (Malang: Inteligencia Media, 2020).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2019).
- Urip Santoso, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- \_\_\_\_\_, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- \_\_\_\_\_, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2015).

## **JURNAL**

- Beby Ista Pranoto dan Sunarno, “Upaya Hukum Penyelesaian Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda di Yogyakarta”, *Media of Law and Sharia*, Vol. 1, No. 3 2020. DOI: <https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9500>
- Christiana Sri Murni, “Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.2 Juni 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.177>
- Harris Yonatan Parmahan, “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2 2020. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.218>
- Irwan Permadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum”, *Yustisia*, Vol. 5, No. 2 Mei-Agustus 2016. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8762>
- Maya Taqiyyah, “Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v5i1.7272>
- Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, *Law Review*, Vol. 5, No. 3 Maret 2006.
- Partogi H.M. Hutajulu, “Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Proses Percepatan Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tahuna”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 1 Februari 2017.
- Prasetyo Aryo, *et.al*, “Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertipikat Ganda di Badan Pertanahan Nasional”, *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 1 Tahun 2020. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29170>

## **HASIL PENELITIAN**

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Keberlanjutan Modernisasi Peradilan”. Laporan Tahunan 2019. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997).

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28).
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 569).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018.

#### **PUTUSAN**

- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pdt.G/2016/PN DPS.
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 23/Pdt/2017/PT.DPS.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2174 K/Pdt/2017.
- Putusan Peninjauan Kembali Nomor 410 PK/Pdt/2019.

#### **INTERNET**

- Rizkie Fauzian, “Sertifikat Elektronik Menjamin Kepastian Hukum”.  
<https://www.medcom.id/properti/news-properti/3NOq35Xk-sertifikat-elektronik-menjamin-kepastian-hukum>, diakses pada 24 Oktober 2021.

#### **KAMUS**

- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (United States of America: Thomson Reuters, 2009).
- Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pekaseh>

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanah>

Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, (Indonesia: Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2012-2021). <https://kbbi.web.id/tumpang-tindih>

